

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kinerja Keuangan Berbasis *Value for Money*

2.1.1.1 Definisi Kinerja Keuangan Berbasis *Value for Money*

Kinerja keuangan berbasis *value for money* merupakan pengukuran dan pemeriksaan kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mohamad Mahsun, 2013:132). Kinerja suatu organisasi dikatakan baik ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) (Mohamad Mahsun, 2013:179).

Menurut Mohamad Mahsun (2013:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara itu, PP Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Mulia (2018:15) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan

berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar (2017) dalam laman resminya menyebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Mardiasmo (2017:4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Abdul Halim dan Muhammad Syam (2012:5) menyebutkan bahwa penerapan konsep *value for money* berarti pemerintah daerah dituntut selalu menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencari dana maupun menggunakan dana. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan setiap rupiah uang yang diperoleh dan digunakan.

Mohamad Mahsun (2013:179) menjelaskan bahwa ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik, efisiensi berarti bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi, sedangkan efektivitas berarti pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan *output* yang dihasilkan.

2.1.1.2 Manfaat Implementasi *Value for Money*

Dalam Mardiasmo (2017:7) disebutkan bahwa manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik ialah sebagai berikut.

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Sementara itu, Halim dalam Mohamad Mahsun (2013:186) menyebutkan bahwa konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat berupa:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

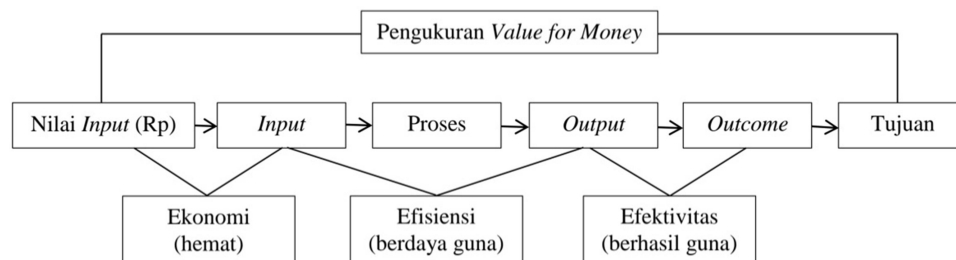
5. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

2.1.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis *Value for Money*

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mohamad Mahsun, 2013:26).

Menurut Mardiasmo (2017:121) pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja, membantu dalam pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Mardiasmo (2017:131-132) menjelaskan bahwa pengukuran *value for money* dilakukan menggunakan indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) serta indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Pengukuran *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1
Pengukuran *Value for Money*

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa ekonomi membahas mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas mengenai masukan (*input*) dan keluaran (*output*), sedangkan efektivitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Indikator ekonomi menggambarkan kehematan dalam pembelian barang dan jasa masukan. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program.

Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja ialah informasi finansial dan informasi nonfinansial (Mardiasmo, 2017:123). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dilakukan menggunakan informasi finansial. Pengukuran atau penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas (Mahmudi, 2019:89). Pengukuran kinerja keuangan berbasis *value for money* dapat dilakukan menggunakan tingkat ekonomi, tingkat efisiensi, dan tingkat efektivitas.

2.1.1.4 Tingkat Ekonomi

Menurut Mardiasmo (2017:131) ekonomi ialah praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan. Ekonomi sering disebut sebagai kehematan yang mencakup pengelolaan secara hati-hati, cermat, dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengukuran ekonomi di antaranya: apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya yang dianggarkan, apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan, dan apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal (Mardiasmo, 2017:133).

Menurut Mohamad Mahsun (2013:186-187) tingkat ekonomi adalah tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, diukur menggunakan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Sementara itu, kriteria tingkat ekonomi ialah sebagai berikut.

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis.

Menurut Mohamad Mahsun (2013:188) perhitungan tingkat ekonomi dapat menggunakan anggaran belanja dengan realisasinya. Oleh karena itu, tingkat ekonomi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2.1.1.5 Tingkat Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2017:132) efisiensi berkaitan dengan produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika

hasil kerja tertentu dapat dicapai menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan keluaran dan masukan. Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keluaran pada tingkat masukan yang sama, meningkatkan keluaran dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan masukan, menurunkan masukan pada tingkat keluaran yang sama, dan menurunkan masukan dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan keluaran (Mardiasmo, 2017:133-134).

Menurut Mohamad Mahsun (2013:187) tingkat efisiensi adalah tingkat *input* dari organisasi sektor publik terhadap tingkat *output*-nya sektor publik, dapat diukur menggunakan perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Sementara itu, kriteria tingkat efisiensi ialah sebagai berikut.

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti efisien.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efisien berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak efisien.

Menurut Mohamad Mahsun (2013:189) perhitungan tingkat efisiensi dapat menggunakan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan yang diasumsikan sebesar total realisasi belanja, kemudian dibandingkan dengan total realisasi pendapatan. Oleh karena itu, tingkat efisiensi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

2.1.1.6 Tingkat Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017:132) efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas ialah hubungan antara *output* dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif kinerja suatu organisasi.

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat bahwa suatu program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak, serta tidak menyatakan tentang biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan (Mardiasmo, 2017:133-134).

Menurut Mohamad Mahsun (2013:187-188) tingkat efektivitas adalah tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sementara itu, kriteria tingkat efektivitas ialah sebagai berikut.

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif.

- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif.

2.1.2 Alokasi Belanja Modal

2.1.2.1 Definisi Alokasi Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Oleh karena itu, alokasi belanja modal berarti anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Menurut Mardiasmo (2017:67) belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

2.1.2.2 Jenis Belanja Modal

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 belanja modal meliputi belanja-belanja sebagai berikut.

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.2.3 Rasio Alokasi Belanja Modal

Menurut Mahmudi (2019:162-163) rasio belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini dapat menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang, serta pengeluarannya tidak bersifat rutin. Belanja modal akan memengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah.

Belanja modal dan total belanja daerah yang digunakan untuk mengetahui alokasi belanja modal ialah belanja modal dan total belanja daerah yang terdapat pada anggaran. Oleh karena itu, alokasi belanja modal dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Anggaran Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Mulia, 2018:15). Sementara itu, menurut Mardiasmo (2017:4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik

yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Mohamad Mahsun (2013:179) menjelaskan bahwa ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik, efisiensi berarti bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi, sedangkan efektivitas berarti pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan *output* yang dihasilkan.

Kinerja keuangan berbasis *value for money* merupakan pengukuran dan pemeriksaan kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mohamad Mahsun, 2013:132). Oleh karena itu, kinerja keuangan berbasis *value for money* terdiri dari tingkat ekonomi, tingkat efisiensi, dan tingkat efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2017:131) ekonomi ialah praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan. Menurut Mohamad Mahsun (2013:186) tingkat ekonomi adalah tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Indikator dari tingkat ekonomi ialah perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja (Mohamad Mahsun, 2013:188).

Menurut Mardiasmo (2017:132) efisiensi berkaitan dengan produktivitas, di mana suatu kegiatan dikatakan efisien jika hasil kerja tertentu dapat dicapai menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Menurut Mohamad Mahsun (2013:187) tingkat efisiensi adalah tingkat *input* dari organisasi sektor publik terhadap tingkat *output*-nya sektor publik. Indikator dari

tingkat efisiensi ialah perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan (Mohamad Mahsun, 2013:189).

Menurut Mardiasmo (2017:132) efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan, di mana suatu kegiatan dikatakan efektif jika mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Menurut Mohamad Mahsun (2013:187) tingkat efektivitas adalah tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Indikator dari tingkat efektivitas ialah perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan.

Sementara itu, menurut PP No. 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Oleh, karena itu, alokasi belanja modal berarti anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator dari alokasi belanja modal ialah perbandingan antara anggaran belanja modal dan total anggaran belanja daerah (Mahmudi, 2019:163).

Menurut Mardiasmo (2017:121) pengukuran kinerja sektor publik salah satunya dimaksudkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dapat memengaruhi alokasi sumber daya, termasuk alokasi belanja modal. Selain itu, salah satu manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik ialah alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2017:7). Implementasi konsep *value for money* dapat terlihat dari kinerja keuangan yang

ekonomis, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dapat memengaruhi alokasi belanja, termasuk alokasi belanja modal.

Tingkat ekonomi memiliki kriteria yaitu jika nilainya semakin rendah maka kinerja dapat dikatakan semakin ekonomis (Mohamad Mahsun, 2013:186-187). Mardiasmo (2017:7) menyatakan bahwa implementasi konsep *value for money* (termasuk ekonomi) dapat memberikan manfaat berupa alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, termasuk alokasi belanja modal. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat ekonomi maka semakin tinggi alokasi belanja modal. Dalam kata lain, tingkat ekonomi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Tingkat efisiensi memiliki kriteria yaitu jika nilainya semakin rendah maka kinerja dapat dikatakan semakin efisien (Mohamad Mahsun, 2013:187). Mardiasmo (2017:7) menyatakan bahwa implementasi konsep *value for money* (termasuk efisiensi) dapat memberikan manfaat berupa alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, termasuk alokasi belanja modal. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat efisiensi maka semakin tinggi alokasi belanja modal. Dalam kata lain, tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Tingkat efektivitas memiliki kriteria yaitu jika nilainya semakin tinggi maka kinerja dapat dikatakan semakin efektif (Mohamad Mahsun, 2013:187-188). Mardiasmo (2017:7) menyatakan bahwa implementasi konsep *value for money*

(termasuk efektivitas) dapat memberikan manfaat berupa alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, termasuk alokasi belanja modal. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat efektivitas maka semakin tinggi alokasi belanja modal. Dalam kata lain, tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

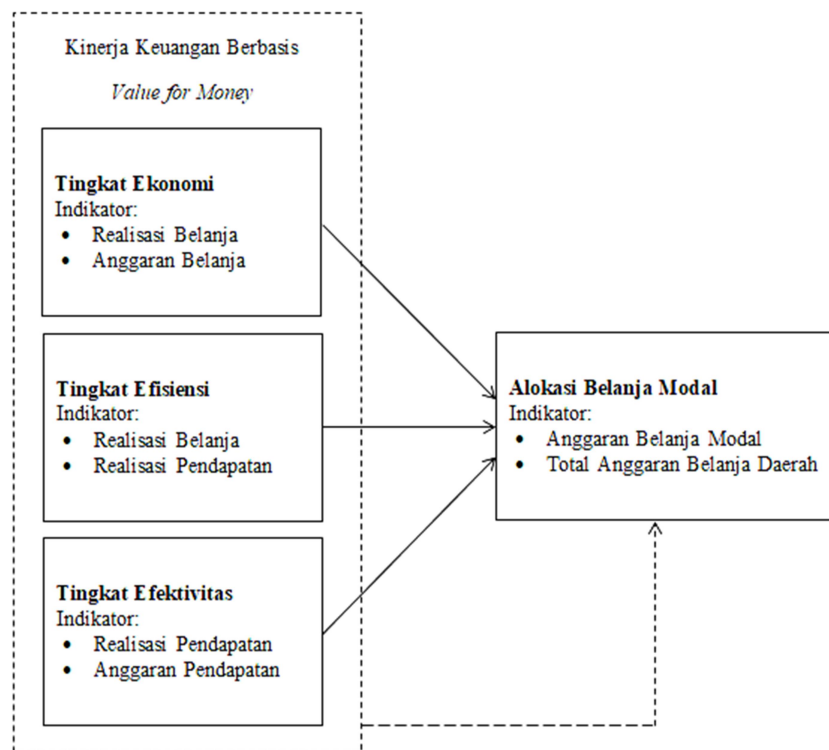
Asepma, dkk. (2015) menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selain itu, Havid & Yanuar (2011) menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, di mana semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya. Sementara itu, Dihan Lucky (2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Anisya, dkk. (2019) menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sylvia, dkk. (2015) serta Kadek, dkk. (2015) menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan Muhammad Arif & Fefri (2019) serta Rilo (2015) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, Aula (2013) menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Anisya, dkk. (2019) menyatakan bahwa tingkat efektivitas berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. I Ketut & Nyoman (2015) serta Lilis, dkk. (2017) menyatakan bahwa tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Begitu pula Sylvia, dkk. (2015), Kurni & Afrizal (2015),

serta Rilo (2015) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil yang sama diperoleh dari penelitian yang dilakukan Riko & Rafiudin (2015), Lufki & Rizal (2015), serta Kornelis & Payamta (2019). Sementara itu, Muhammad Zulkarnain, dkk. (2019) serta Aula (2013) menyatakan bahwa tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Mohamad Mahsun (2013:187-189) dan Mahmudi (2019:163)

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—→ = Secara parsial

---→ = Secara simultan/bersama-sama

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) berpengaruh secara parsial sebagai berikut.
 - a. Tingkat Ekonomi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.
 - b. Tingkat Efisiensi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.
 - c. Tingkat Efektivitas berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.
2. Kinerja keuangan berbasis *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) berpengaruh secara bersama-sama terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.